BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Bina Marga

Sejarah merupakan suatu peristiwa yang terjadi dimasa lampau yang sangat berpengaruh bagi kehidupan suatu bangsa, organisasi atau instansi pemerintah. Oleh karena itu banyak yang tahu suatu kejadian merupakan pedoman atau ilmu pengetahuan untuk generasi yang akan datang.

Demikian pula yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai nilai–nilai historis yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga zaman, yaitu :

1. Zaman Penjajahan Belanda
2. Zaman Penjajahan Jepang
3. Zaman Setelah Kemerdekaan

1. Zaman Penjajahan Belanda

Pada Zaman Penjajahan Belanda Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dikenal dengan sebutan "BOW" yaitu singkatan dari BURGELIJ OPENTURE WALKEN. Walaupun pada saat itu Bangsa Indonesia sedang terjajah, tidak sedikit putra-putri bangsa yang ikut menjadi pelopor dalam mendirikan birokrasinya.

Dalam keadaan Bangsa Indonesia terjajah, maka dalam hal ini gerakannya sangat terbatas dan sederhana serta pengabdiannnya dimanfaatkan oleh Bangsa Belanda untuk kepentingan bangsanya sendiri, misalnya : Pembangunan jalan, hasil perkebunan yang pelaksanaan tugasnya dengan menggunakan Tenaga Kerja Indonesia melalui kerja paksa yang disebut "Kerja Rodi".

2. Zaman Penjajahan Jepang

Setelah Jepang mengalahkan Belanda maka berakhir pula seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang dikenal dengan "Kerja Rodinya". Dengan kekalahan Belanda itu maka "BOW" berubah namanya menjadi "DOMUKO JIMUSO", Kemudian Jepang merubah kebiasaan Belanda termasuk aparatur pemerintahannya dan dalam pelaksanaannya di titik beratkan kepada kerja paksa yang disebut "Romusha". Dengan adanya Romusha ini Bangsa Indonesia lebih memprihatinkan lagi keadaannya dan kehidupannya dibandingkan ketika dijajah Belanda.

3. Zaman Setelah Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan. Walaupun Bangsa Indonesia telah merdeka, tidak berarti Bangsa Indonesia bebas total tetapi masih banyak yang harus dibenahi dan dipertahankan supaya tidak terjajah kembali.

Sejarah "BOW" dan "DOBUKO JIMOSO" dirubah namanya menjadi "PUTL" yang dikenal dengan sebutan Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, yang menjadi pelopor Kebangkitan Pekerjaan Umum yang ditetapkan pada tanggal 3

Desember 1945. Dengan semangat pengabdian kepada negara, PUTL memulai pengabdiannya dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat demi membangun negara yang merdeka.

Dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa, pada saat itu pula warga PUTL disamping berjuang membela tanah air juga merupakan kantir jawatan Pekerjaan Daerah Jawa Barat. Kemudian pada tahun 1953 pemerintah mengeluarkan peraturan yang berisi tentang penyerahan tugas-tugas Dinas Pekerjaan Umum di Daerah Jawa Barat, yaitu Jawatan Otonomi.

Dengan adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, maka jawatan ini diberi nama " Dinas Pekerjaan Umum" yang terletak di daerah Jawa Barat dan langsung dibentuk Susunan Pemerintah sesuai dengan UUD 1945 yang berpedoman pada Pancasila.

2.2. Struktur Organisasi Dinas Bina Marga

Strruktur Organisasi Dinas Bina Marga Daerah Jawa Barat No. 15 /Kep / tanggal 12 Desember 2000 mengenai susunan organisasi Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
    - Sub Bagian Kepegawaian
    - Sub Bagian Keuangan
    - Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana

- Sub Bagian Umum

3. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari :

   - Seksi Data dan Informasi
   - Seksi Penyusunan Program
   - Seksi Evaluasi dan Pelaporan
   - Seksi Pengujian Tanah dan bahan Jalan

4. Sub Dinas Bina Teknik, terdiri dari :

   - Seksi Tata Teknik dan Bina Teknik
   - Seksi Perancangan
   - Seksi Pengujian Tanah dan Bahan Jalan

5. Sub Dinas Bina Pembangunan, terdiri dari :

   - Seksi Tata Teknik Pembangunan
   - Seksi Pembanunan Jalan
   - Seksi Pembangunan Jembatan

6. Sub Dinas Pemeliharaan, terdiri dari :

   - Seksi Tata Teknik Pemeliharaan
   - Seksi Pemeliharaan Jalan
   - Seksi Pemeliharaan Jembatan

7. Sub Dinas Pengawasan Pemanfaatan, terdiri dari :

- Seksi Tata Teknik Pengawasan Pemanfaatan
- Seksi Pengawasan Jalan
- Seksi Pemanfaatan Jalan

8. Unit Pelaksana Teknik Dinas

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktu Organisasi Sub Bagian Keuangan terdiri dari :

a. Unsur Bendaharawan, terdiri dari :
   - Bendaharawan Rutin
   - Bendaharawab Gaji
   - Bendaharawan Khusus Penerima
   - Bendaharawan Proyek

b. Unsur Tata Usaha

c. Urusan Anggaran

d. Urusan Pembendaharaan

e. Urusan Verifikasi

2.3. **Deskripsi Jabatan Dinas Bina Marga**

Tugas dan tanggung jawab Sub Bagian Keuangan adalah :

a. Unsur Bendaharawan

1. Bendaharawan Rutin ditugaskan untuk mengelola pengeluaran atas beban anggaran rutin baik untuk beban tetap maupun beban sementara.
2. Bendaharawan Gaji ditugaskan untuk mengelola pengeluaran atas beban anggaran gaji baik untuk beban tetap maupun beban sementara.
3. Bendaharawan Khusus Penerima ditugaskan mengurus penerimaan daerah yaitu penerimaan hasil pungutan pendapatan daerah, menyimpan dan melakukan penyetoran ke kas daerah.
4. Bendaharawan proyek ditugaskan untuk mengelola pengeluaran atas suatu proyek yang sedang dijalankan.

b. Urusan Tata Usaha

1. Melaksanakan urusan tata usaha keuangan.
2. melaksanakan pengetikan / pengadaan surat-surat dan naskah.
3. Mengurus absensi keuangan.
4. Menyusun daftar urusan Pimpro ? pimbagpro.
5. Pencataan surat keluar atau masuk yang berhuhbungan dengan keuangan.
6. Melaksanakan inventarisasi Sub Bagian Keuangan.
7. Mengurus Keuangan Pegawai
8. Menyusun arsip dan peraturan bidang keuangan.

9. Penyusunan dan penomoran Surat Permintaan Pembayaran rutin pembangunan.

c. Urusan Anggaran

1. Menyiapkan / menyusun bahan-bahan rencana usulan kegiatan rutin dan pembangunan.
2. Pengumpulan dan pencatatan Formulir Master Gaji.
3. Pengumpulan dan pencatatan Surat Perintah Membayar Uang
4. Penyusunan anggaran penerimaan negara bukan pajak.
5. Penyajian informasi keuangan.

d. Urusan Bendaharawan

1. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan administrasi keuangan.
2. Penyusunan daftar usulan bendaharawan
3. Melakukan / meneliti hasil pemeriksa kas triwulan yang dilakukan oleh atasan bendaharawan.
4. Mengevaluasi temuan-temuan pemeriksaan dan pelaksanaan penyelesaian negara.
5. Membantu tugas-tugas pemeriksaan intern maupun ekstern

e. Urusan Verifikasi

1. Memeriksa tanda-tanda bukti surat pertanggungjawaban gaji, rutin dan pembangunan.

2. Menyusun laporan hasil pemeriksaan.
3. Penyusunan, penyimpanan dan pengurusan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga.
4. Penyusunan laporan realisasi anggaran.

2.3. Aspek kegiatan Dinas Bina Marga

Rencana kerja Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Barat disesuaikan dengan kebijaksanaan umum dari pemerintah pusat. Departemen Pemukiman dan Prasarana wilayah maupun Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Untuk menunjang kegiatan pembangunjan sosial ekonomi dalam pengembangan prasarana fisik, mengingat sektor perhubungan memegang peranan penting Dinas Bina Marga melakukan kegiatan antara lain memperlancar arus barang dan jasa, memperlancar hubungan antara daerah produsen dan daerah konsumen serta hubungan antara desa dan kota. Mengembangkan hubungan dari atau ke daerah Propinsi terpencil yang berpotensi tinggi, memperlancar jalannya roda Pemerintahan, memperlancar dan mempertinggi tingkat pertahanan dan keamanan. Untuk realisasinya dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan jalan dan jembatan dengtan maksud mempertahankan kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi mantap.
2. Peningkatan dan perbaikan jalan.
3. Peningkatan serta perbaikan jembatan secara gotong royong.

4. Pengadaan peralatan penunjang prasarana jalan seperti jembatan Bailey, peralatan laboratorium serta pemeliharaan peralatan penunjang untuk penyelidikan bahan tanah dan jalan.

5. Penanggulangan bencana alam.